

KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Oleh:

Ade Irna T. Pangalasen^(1,2)

1. Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, Pascasarjana Unsrat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
email: irna_pangalasen@yahoo.com

ABSTRAK

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kawasan perbatasan di Indonesia dengan karakteristik daerah yaitu sebagai daerah kepulauan, daerah tertinggal dan terisolir, serta rawan bencana, mengalami hal-hal yang juga dialami oleh kawasan perbatasan lainnya, seperti infrastruktur dan armada perhubungan yang kurang mendukung. Klasifikasi lintas batas tradisional, menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran di *entry exit point* Miangas, sehingga perdagangan lintas batas sering merugikan masyarakat di kawasan perbatasan dan menimbulkan permasalahan baik secara keamanan maupun kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola pengembangan perekonomian kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Digunakan analisis shift share dan model pendekatan gravitasi untuk mengukur kinerja sektor ekonomi dan daya tarik Tibanban sebagai sisi perbatasan di Filipina. Hasilnya menunjukkan bahwa Talaud memiliki berbagai potensi seperti sektor pertanian dengan subsektor perkebunan dan perikanan yang merupakan sektor basis dan pemberi kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten. Miangas sebagai sisi perbatasan Indonesia-Filipina sangat merasakan keterisolasian, sehingga interaksi perdagangan lintas batas Indonesia-Filipina di Miangas sebagai *entry exit point* perlu untuk ditingkatkan menjadi klasifikasi internasional.

Kata kunci: kawasan perbatasan, analisis shift share, pendekatan gravitasi, pos lintas batas.

ABSTRACT

Talaud Archipelago Regency as one of border areas in Indonesia which has the following characteristics namely archipelagic border area, underdeveloped and isolated area, hazzardes of natural disaster, also experiences things that occur at the border areas such as less supporting infrastructure and fleet transport. Being classified as a traditional border crossings area, many violations occur in the entry exit points Miangas, the border crossing trade becomes detrimental to the people of the both border area and the same time creates security and welfare problems. This research aims to review the pattern of economic development of the border area at Talaud Regency. The shift share analysis and gravity model approach was used to measure the performance of the economic sector and Tibanban attraction as side of the Philippines. The results showed that Talaud prossesed various potential such as agriculture consisting of plantation and fisheries subsector as the basis sector and the largest contribution to GDP. Miangas, the border area at the side of Indonesia strongly feel isolation, so that interaction between Indonesia and the Philippines in Miangas as entry exit points need to be improved and gain international classification.

Keywords: border area, shift share analysis, gravitation approach, border crossings.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kawasan perbatasan menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara adalah bagian dari wilayah suatu negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah dengan negara lain berdasarkan garis batas pemisah kedaulatan suatu negara secara hukum internasional. Namun, kawasan perbatasan sering dilihat sebagai *periphery* suatu negara (Setiadi, 2009) karena letaknya yang jauh dari ibu kota provinsi apalagi ibu kota negara.

Di Indonesia kawasan perbatasan dikelompokkan menjadi kawasan perbatasan laut dan darat. Dari sepuluh kawasan perbatasan di Indonesia, terdapat empat Pos Lintas Batas (PLB) dengan klasifikasi Internasional dan enam kawasan perbatasan lainnya berada pada klasifikasi tradisional, diantaranya Pos Lintas Batas (PLB) Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan laut dengan negara Filipina (Tim Penyusun (c), 2011). Masing-masing kawasan perbatasan tersebut memiliki karakter sosial dan ekonomi yang relatif berbeda, namun memperlihatkan adanya fenomena yang sama yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan sosial kultural secara tradisional maupun aktivitas ekonomi modern (Koespramoedyo dkk, 2003) yang dapat menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan memberi peluang bagi peningkatan produksi sehingga menimbulkan *multiplier effect* yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rajasa 2001 dalam Husnadi 2006).

Di wilayah utara Indonesia ada Kabupaten Kepulauan Talaud yang berbatasan laut dengan negara Filipina, dengan jumlah penduduk 83.441 jiwa dan 48,73% diantaranya merupakan penduduk miskin akibat daya beli masyarakat yang terus menurun karena inflasi yang sangat tinggi (Tim Penyusun (a), 2012 : 67). Pertumbuhan ekonomi Talaud pada tahun 2011 berada pada angka 5,65%, angka ini menunjukkan nilai positif karena mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 5,51% (Tim Penyusun (b), 2012 : 28).

Sama halnya dengan kawasan perbatasan lainnya, Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki potensi sumber daya alam (SDA) sangat besar yang bernilai ekonomis dan dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah (Hadi, 2008) terutama di sektor pertanian subsektor perkebunan dan perikanan. Pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan saat ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan yang kompleks. Diantaranya kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang masih terisolir dan tertinggal dibanding daerah lainnya, infrastruktur yang minim dan belum memadainya pos-pos di wilayah perbatasan sehingga berakibat lemahnya pengawasan wilayah perbatasan dengan seringnya terjadi kasus pelanggaran lintas batas (Tim Redaksi, 2012), sementara di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina telah mengembangkan daerah perbatasannya sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai sarana dan prasarana fisik yang lengkap serta sumberdaya manusia yang berkualitas (Zuasola, 2011). Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Talaud salah satu Kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi adalah Pengembangan perdagangan dan industri daerah berbasis sumber daya lokal yang relatif besar seperti pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata (Tim Penyusun (f): II 8). Hal ini merupakan tantangan bagi perekonomian di Talaud dengan produktivitas masyarakat yang masih rendah dan sumber daya alam yang belum terkelola dengan efisien. Kemudian, Pos Lintas Batas (PLB) di Miangas masih berklasifikasi tradisional dengan perdagangan yang tidak dikenakan pajak dan bea masuk sebagaimana lazimnya perdagangan normal (ekspor-impor yang dikenakan pajak dan bea masuk atau *duty*) kecuali barang-barang yang tergolong *negative list system*. Untuk saat ini disetujui nilai perdagangan di PLB Indonesia - Filipina adalah US \$250/ perahu/ PLB dengan jangka waktu izin tinggal adalah 59 hari/ sekali pelayaran terjadi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2007). Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penyelundupan barang dan orang yang tidak diinginkan keluar masuk perbatasan, namun di sisi lain masyarakat di Miangas memerlukan aktivitas perdagangan lintas batas karena jarak mereka lebih dekat ke desa Tibanban dan desa-desa lainnya di kotamadya Governor Generoso untuk mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari.

Rumusan Masalah

Perlu dilakukan kajian pola pengembangan ekonomi kawasan perbatasan Indonesia - Filipina di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola pengembangan perekonomian kawasan perbatasan Indonesia – Filipina di Kabupaten Kepulauan Talaud.

TINJAUAN PUSTAKA

Kawasan Perbatasan

Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan kawasan perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Kawasan perbatasan Negara meliputi kawasan perbatasan daratan dan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar (Tim Penyusun (e), 2011).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Paradigma baru, pengembangan kawasan perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang berorientasi *inward looking*, menjadi *outward looking* (Tim Penyusun (e), 2011). Dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), pendekatan keamanan (*security approach*), dengan tidak meninggalkan aspek lingkungan (*environment*) tetap menjaga kedaulatan (*sovereignty*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya akses perdagangan yang dimiliki, kawasan perbatasan dapat menjadi pintu masuk mengalirnya devisa ke dalam negeri dan mendorong tumbuhnya produksi di dalam negeri (Suratman, 2004).

Teori Pusat-Pinggiran (*Core periphery theory*)

Melalui karyanya yang berjudul *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela* (1966), Friedman, Weaver menganalisa aspek tata ruang, lokasi serta persoalan-persoalan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Friedman telah menampilkan teori daerah inti. Disekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau *periphery region*. Daerah pinggiran ini sering disebut pula daerah pedalaman atau daerah-daerah sekitarnya. Koeksistensi itu digambarkan sebagai hubungan kekuasaan yang sangat tidak berimbang antara pusat (*core*) serta pinggiran (*periphery*) (Todaro, 2006: 141).

Friedmann menjelaskan pandangannya mengenai transformasi sistim perkotaan di dunia ketiga. Ia menyatakan bahwa bahwa dalam skala regional terdapat hirarki pusat- pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut “Pusat Pertumbuhan Primer” yang merupakan pusat utama dari daerah yang dapat merangsang pertumbuhan pusat-pusat yang lebih rendah tingkatannya; “Pusat Pertumbuhan Sekunder” yang berperan memperluas dampak perambatan ke wilayah yang tidak terjangkau oleh pusat pertumbuhan primer; dan “Pusat Pertumbuhan Tersier” sebagai titik pertumbuhan bagi daerah belakangnya (Setiadi, 2009).

Penelitian terdahulu

Kurniadi (2009), menyatakan strategi pengembangan wilayah perbatasan antar negara: Memacu pertumbuhan ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Strategi yang dihasilkan memberikan perspektif solusi bagi permasalahan yang muncul dalam pengembangan wilayah perbatasan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kawasan perbatasan Indonesia-Filipina. Menggunakan data PDRB dari BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dan dari *Phillipine Statistical Yearbook*. Analisis yang digunakan adalah:

Analisis *Shift Share*

Shift share merupakan salah satu metode analisis yang cukup penting dalam perencanaan wilayah. Pendekatan ini dilakukan dengan metode menggabungkan dua hal pokok, yakni unsur spasial dan unsur sektoral yang diterapkan dalam kerangka dimensi waktu. Model *shift share* diterapkan untuk menganalisis komponen-komponen yang menentukan terjadinya pertumbuhan perekonomian lokal untuk satu periode tertentu (Setiono, 2011: 493-497).

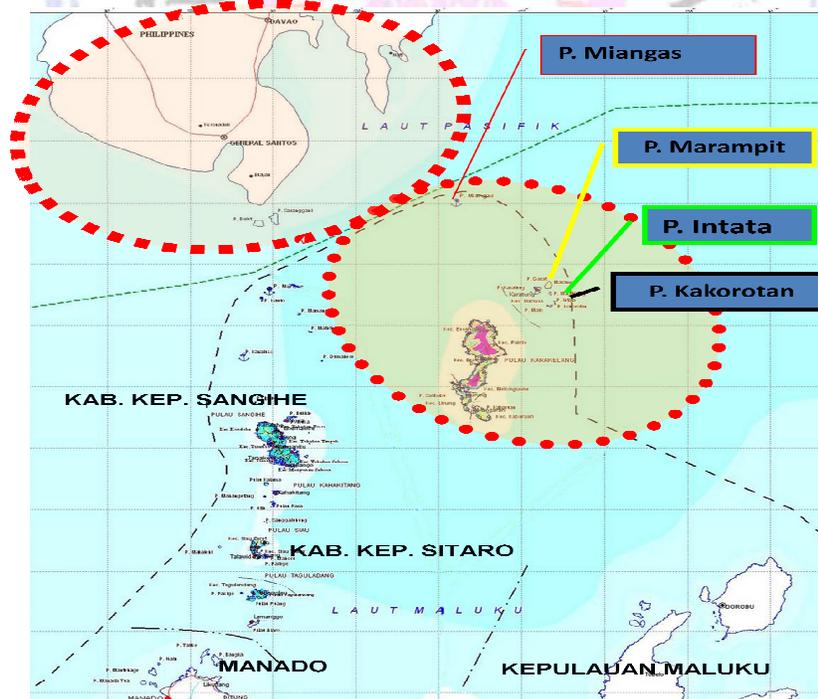
Model Pendekatan Gravitasi

Interaksi antara dua lokasi didekati dengan model gravitasi untuk melihat kaitan potensial suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut (Tarigan, 2009: 104). Masing-masing lokasi diasumsikan sebagai suatu massa tertentu yang memiliki sifat gaya tarik. Interaksi sosial ekonomi dalam konteks ini dapat berupa volume transaksi perdagangan, pergerakan lalu lintas orang dan barang serta perdagangan antar wilayah (Setiono, 2011: 123-125) .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kepulauan Talaud, Perbatasan Indonesia-Filipina

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian integral dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak pada $5^{\circ}33'00''$ - $03^{\circ}38'00''$ Lintang Utara dan $126^{\circ}38'00''$ - $127^{\circ}10'00''$ Bujur Timur dengan ibu kota Melonguane dan jarak sekitar 271 mil laut dari Manado ibu kota Provinsi Sulawesi Utara (Tim Penyusun (a), 2012). Daerah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud menurut UU Nomor 8 tahun 2002 pada tanggal 2 Juli tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 19 kecamatan, 11 kelurahan, dan 142 desa, dengan karakteristik wilayah yaitu sebagai kawasan perbatasan, sebagai daerah kepulauan, sebagai daerah tertinggal dan daerah rawan bencana. Keadaan penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 84.378 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki 41.952 Jiwa dan perempuan sejumlah 42.426 Jiwa. Letak Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kawasan perbatasan dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kawasan perbatasan Indonesia-Filipina di Kabupaten Kepulauan Talaud

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Talaud. 2011

Analisis Perkonomian Kawasan Perbatasan**Analisis *Shift Share***

Kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan potensi yang ada menuju daerah yang mandiri dapat diukur dari kinerja sektor ekonomi lokal dan dalam kerangka acuan wilayah yang lebih besar untuk suatu periode tertentu, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis *shift share* sehingga dapat diperoleh sektor yang progresif (Setiono, 2011: 496). Selain itu, pendekatan ekonomi basis juga digunakan untuk mendapatkan sektor unggulan yang bisa menimbulkan efek *multiplier* bagi perekonomian wilayah sebagai kawasan perbatasan antarnegara (Kurniadi, 2009).

Tabel. 1. PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2007-2011

NO	SEKTOR	2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	184,159.40	187,846.60	187,792.97	194,912.65	190,690.13
2	Pertambangan dan penggalian	8,510.90	9,294.62	11,064.03	11,847.03	13,160.01
3	Industri Pengolahan	6,574.20	7,109.47	8,100.90	8,779.03	9,617.04
4	Listrik, Gas, dan Air bersih	721.10	686.99	697.74	719.88	877.74
5	Bangunan	30,647.20	34,798.37	40,382.63	44,063.08	47,812.40
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	34,825.30	37,682.47	41,389.02	44,897.95	50,343.82
7	Pengangkutan dan Komunikasi	27,184.50	29,385.41	31,499.66	33,632.85	40,743.17
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan	21,035.50	22,933.33	24,606.67	26,697.14	30,063.84
9	Jasa-jasa	50,354.80	54,398.53	58,369.48	60,624.31	66,937.91
	PDRB	364,012.90	384,135.79	403,903.10	426,173.92	450,246.06

Sumber: PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud 2011, 2010, 2009

Tabel 1 menyajikan nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 sampai 2011 Atas Dasar Harga Konstan, dan Tabel 2 menyajikan distribusi persentase PDRB ADHK menurut sektor. Terlihat sektor pertanian merupakan penyumbang nilai PDRB terbesar dengan persentase kontribusi sebesar 49,77% tahun 2007; 48,36 % tahun 2008; 44,72 % tahun 2009 ; 44,13% pada tahun 2010 dan 44,41% di tahun 2011. Selanjutnya diikuti oleh sektor Jasa-jasa, sedangkan sektor Perdagangan, hotel, dan restoran berada pada urutan ketiga penyumbang PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tabel. 2. Distribusi persentase PDRB ADHK menurut sektor Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2007-2011

NO	SEKTOR	2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	49.77	48.36	44.72	44.13	44.41
2	Pertambangan dan penggalian	2.17	2.25	2.51	2.46	2.39
3	Industri Pengolahan	2.13	2.17	2.40	2.44	2.37
4	Listrik, Gas, dan Air bersih	0.31	0.30	0.28	0.26	0.28
5	Bangunan	9.98	10.73	11.78	12.60	12.22
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	10.11	10.38	10.87	10.52	10.28
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5.48	5.48	5.04	5.26	5.61
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan	6.36	6.51	6.90	7.08	7.21
9	Jasa-jasa	13.68	13.82	15.50	15.25	15.22
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud, 2012

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah basis Sektor Pertanian, dengan sub sektor penyumbang PDRB terbesar adalah sub Sektor Tanaman perkebunan yang diikuti oleh sub Sektor Perikanan dan sub Sektor Tanaman bahan makanan, sedangkan yang memiliki nilai terkecil adalah sub Sektor Kehutanan, kemudian Peternakan dan hasil-hasilnya.

Tabel. 3. PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Utara tahun 2007-2011

NO	SEKTOR	2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	3,065,103	3,243,372	3,310,516	3,684,007	3,594,402
2	Pertambangan dan penggalian	755,846	852,228	899,070	928,483	986,798
3	Industri Pengolahan	1,134,495	1,241,766	1,328,959	1,415,110	1,522,102
4	Listrik, Gas, dan Air bersih	107,870	119,551	137,346	144,246	152,795
5	Bangunan	2,284,241	2,607,061	2,766,026	2,824,276	3,152,097
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2,145,418	2,451,886	2,753,649	2,980,707	3,443,677
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1,666,571	1,907,022	2,229,104	2,411,286	2,573,009
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan	947,855	1,048,650	1,128,037	1,231,494	1,323,747
9	Jasa-jasa	2,236,904	2,430,537	2,596,916	2,757,143	2,985,644
PDRB		14,344,303	15,902,073	17,149,623	18,376,752	19,734,271

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka, 2012

Table 4. Analisis Shift share

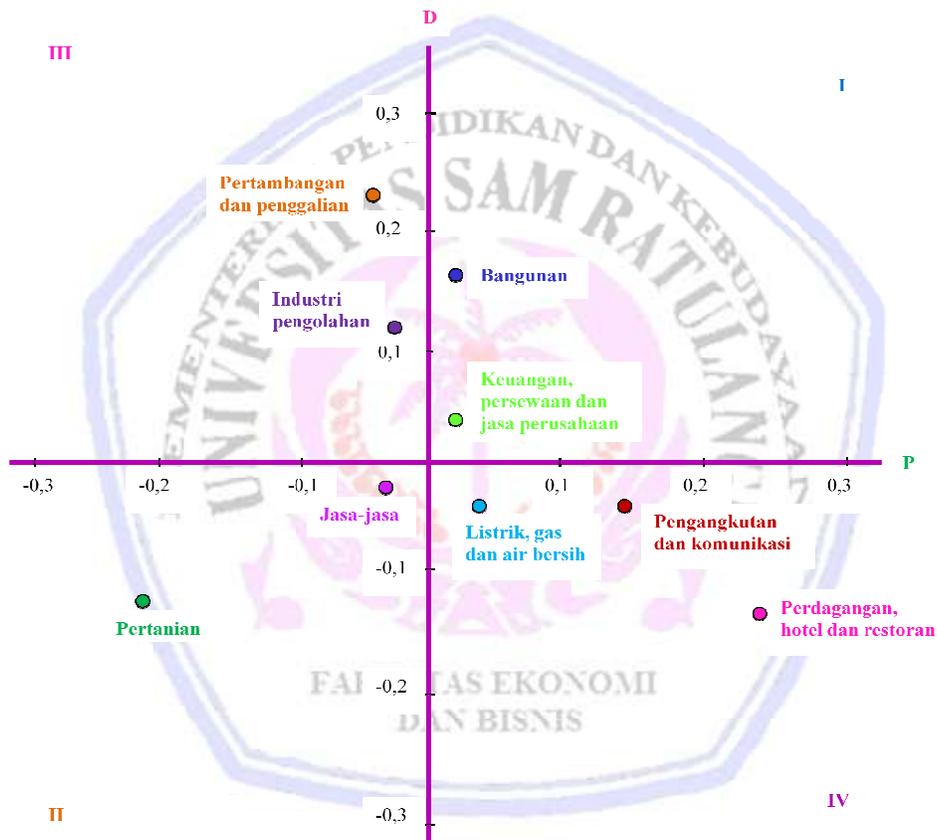
N O	SEKTOR	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi (Faktor Share)	Proporstional Shift	Differential Shift	Pertumbuhan sektoral - lokal	Persen (%)
1	Pertanian	0.376	-0.203	-0.137	0.035	3.55
2	Pertambangan dan penggalian	0.376	-0.070	0.241	0.546	54.63
3	Industri Pengolahan	0.376	-0.034	0.121	0.463	46.28
4	Listrik, Gas, dan Air bersih	0.376	0.041	-0.199	0.217	21.72
5	Bangunan	0.376	0.004	0.180	0.560	56.01
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	0.376	0.229	-0.160	0.446	44.56
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.376	0.168	-0.045	0.499	49.88
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan	0.376	0.021	0.033	0.429	42.92
9	Jasa-jasa	0.376	-0.041	-0.005	0.329	32.93

Sumber : Hasil analisis. 2013

Hasil analisis *shift share* memperlihatkan bahwa Sektor pertanian sebagai basis namun memiliki pertumbuhan sektoral-lokal yang kecil yaitu 4,51 %. Pertumbuhan sektoral dengan *trend* yang negatif ini memperlihatkan suatu keadaan yang kurang baik, karena sebagai basis. Sektor pertanian memiliki kekuatan *multiplier shortrun*, tapi jika pertumbuhan sektoralnya makin lemah maka artinya *multiplier effect*-nya pun makin lama makin lemah juga. Karena sektor pertanian adalah basis dan memiliki efek *multiplier*, maka jika terjadi penurunan itu akan berakibat juga pada sektor-sektor lainnya melalui *backward linkage* atau pun *forward linkage*, hal ini dapat menyebabkan kegiatan perekonomian yang kurang stabil dan jika dibiarkan begitu saja maka pada tingkat tertentu akan mengakibatkan kegoncangan yang sangat merugikan masyarakat dan bisa saja

diawali dengan inflasi yang tiba-tiba muncul. Keadaan seperti ini maka diperlukan campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar. Campur tangan pemerintah daerah yang dapat berupa pembuatan aturan untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi secara wajar atau melakukan ekonomi secara langsung dapat dilakukan untuk memperbaiki kepingangan mekanisme pasar (Sukirno, 2011: 44-45).

Hasil analisis menunjukkan sektor bangunan memiliki pertumbuhan sektoral yang paling besar dengan nilai 56,01 % hal ini dikarenakan selama tahun 2007-2011 ada banyak pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Talaud, apakah itu pembangunan rumah, gedung, pembangunan perkantoran, jalan, dan jembatan. Sektor Pertambangan dan penggalian berada pada urutan kedua untuk nilai pertumbuhan sektoral lokal, hal ini berkaitan dengan sektor bangunan, yaitu dengan meningkatnya pembangunan fisik maka terjadi juga peningkatan terhadap lapangan usaha bahan galian yang merupakan salah satu bahan material dalam pembangunan fisik. Sektor perdagangan juga terus mengalami peningkatan selang tahun 2007-2011, peningkatan terjadi dalam nilai penyumbang PDRB dan dengan analisis shift share sektor ini mempunyai pertumbuhan yang baik yaitu pada angka 46,63 %.



Gambar 2. Posisi kuadran sektor ekonomi Kab. Kepl. Talaud 2007-2011

Sumber : Hasil Analisis. 2013

- 1) Kuadran Winners, dalam kuadran ini adalah sektor-sektor dengan tingkat *proportional shift* dan *differential shift* positif, artinya mengalami pertumbuhan positif di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten lebih besar dari rata-rata pertumbuhan sektoral pada tingkat provinsi. Sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berada pada kuadran ini.
- 2) Kuadran Lossers, Pada kuadran ini *proportional shift* dan *differential shift* memiliki nilai negatif. Artinya, sektor ekonomi pada kuadran ini mengalami kemunduran dalam perekonomian provinsi, dan kemunduran tersebut dialami juga oleh sektor-sektor di tingkat kabupaten. Yang termasuk dalam kuadran ini adalah sektor pertanian dan jasa-jasa.

- 3) Kuadran Mixed Winners, nilai *proportional shift* yang negatif dan *differential shift* yang positif berada pada kuadran ini. Artinya, meskipun dalam perekonomian di tingkat provinsi relatif mengalami kemunduran, namun di tingkat kabupaten sektor-sektor tersebut cenderung semakin kompetitif. Hal tersebut dialami oleh sektor pertambangan dan penggalian juga sektor industri pengolahan.
- 4) Kuadran Mixed Lossers, pada kuadran ini adalah sektor-sektor yang mempunyai nilai *proportional shift* positif dan *differential shift* yang negatif. Artinya, di tingkat provinsi sektor-sektor ini cenderung semakin meningkat, namun di tingkat kabupaten kurang kompetitif sehingga peranannya cenderung menurun dalam perekonomian lokal. Sektor listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi berada pada kuadran ini.

Model Pendekatan Gravitasi

Pendekatan ini menggunakan ukuran jumlah penduduk dan jarak untuk menggambarkan hubungan interaksi antara dua lokasi.

Tabel 5. Jarak sisi perbatasan Governor Generoso Filipina dengan Kabupaten Kepulauan Talaud Indonesia.

No	Nama	Jarak (km)	Keterangan
1	Miangas – Tibanban	106	Kabupaten Kepulauan Talaud - Governor Generoso
2	Miangas - Melonguane	230	Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud
3	Melonguane - Manado	488	Kabupaten Kepulauan Talaud - Provinsi Sulut
4	Melonguane - Tibanban	336	Kabupaten Kepulauan Talaud - Governor Generoso
5	Karatung – Miangas	135	Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud
6	Karatung - Tibanban	241	Kabupaten Kepulauan Talaud - Governor Generoso
7	Karatung - Melonguane	124	Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud

Sumber : Kepulauan Talaud Dalam Angka 2012, dan Philippine News 2013

Tabel 6. Jumlah penduduk di sisi perbatasan Governor Generoso Filipina dan Kabupaten Kepulauan Talaud Indonesia.

No	Nama	Jumlah penduduk (Jiwa)
1	Governor Generoso	50,372
2	Kabupaten Kepulauan Talaud	83,441
3	Karatung	3,372
4	Manado	410,481
5	Miangas	728
6	Melonguane	10,435
7	Tibanban	8,310

Sumber : Kepulauan Talaud Dalam Angka 2012, dan Phillipine Standard Geographic Code Municipality Governor Generoso. Phillipine Statistical Yearbook.2013

Perhitungan menggunakan rumus gravitasi, diperoleh hasil nilai gravitasi untuk interaksi masing-masing lokasi pada tabel 5 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Nilai Gravitasi (F) dalam Satuan (K) untuk Kawasan Perbatasan Indonesia - Filipina

No	Nama	Nilai Gravitasi (K)
1	Miangas - Tibanban	538
2	Miangas - Melonguane	144
3	Melonguane - Governor Generoso	6,142
4	Melonguane - Manado	143,825
5	Karatung - Tibanban	482
6	Karatung - Melonguane	2,288

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Daya tarik-menarik Miangas - Tibanban adalah 538 K satuan daya tarik, nilai ini 3,8 kali lebih kuat dari pada daya tarik-menarik Miangas - Melonguane yaitu 144 K satuan daya tarik. Jika daya tarik tersebut setara dengan interaksi sosial ekonomi antar lokasi, maka dapat dinyatakan bahwa interaksi sosial ekonomi kawasan perbatasan Indonesia-Filipina di Miangas lebih kuat ke Tibanban yang ada di negara tetangga Filipina dari pada ke Melonguane sebagai ibu kota Kabupaten. Nilai gravitasi ini menggambarkan aktivitas perekonomian di Miangas yang lebih cenderung terjadi dengan para pedagang dari Tibanban. Perdagangan lintas batas tergambar jelas di Miangas, masyarakat Miangas membeli bermacam barang dari Tibanban mulai dari barang kebutuhan sehari-hari yang habis pakai seperti makanan, sabun, minuman, sampai barang porselen dan hiasan rumah.

Transaksi barang-barang yang masuk dari Filipina ke Miangas dapat dilakukan oleh pedagang dan masyarakat Miangas dengan memesan barang-barang yang mereka inginkan kepada para pedagang yang datang dari barangay Tibanban dengan tujuan untuk berdagang dan membeli ikan. Selain dari Tibanban, ada juga pedagang yang datang dari Lavigan, Luzon, Magdug. Bahkan ada juga pedagang yang datang dari kota Mati yang merupakan Ibu kota Provinsi Davao Oriental, mereka datang melalui *entry exit point* di Tibanban Border Crossing Station. Selain itu, para pedagang dan masyarakat Miangas dapat pergi langsung ke Tibanban untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan, bahkan bukan hanya di Tibanban saja tapi ada juga yang langsung pergi ke Governor Generoso bahkan ke provinsi Davao Oriental. Transaksi-transaksi yang dilakukan tetap mengacu pada ketentuan yaitu US \$ 250 untuk pedagang per pelayaran dan US \$ 100 untuk masyarakat perbatasan per pelayaran.

Karatung sebagai ibu kota Kecamatan Nanusa juga dinyatakan sebagai kawasan border Indonesia - Filipina di Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki nilai gravitasi yang 4,8 kali lebih lemah dari daya tarik Karatung - Melonguane. Dari angka tersebut tergambar bahwa interaksi ekonomi dan sosial di Kecamatan Nanusa lebih kuat ke Melonguane.

Melonguane ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian dari perdagangan lintas batas Indonesia - Filipina, para pedagang yang membeli barang-barang di Filipina membawanya ke Melonguane untuk dijual di sana. Daya tarik menarik Melonguane-Governor Generoso lemah jika dibandingkan dengan Melonguane - Manado, hal ini dapat terlihat seperti keadaan yang terjadi di lokasi. Nilai yang kecil ini menunjukkan keadaan bahwa aktivitas lintas batas kurang bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud lainnya seperti di kota Melonguane dan kota-kota lainnya karena berkaitan dengan klasifikasi tradisional perbatasan Indonesia - Filipina di Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga kenyataannya hanya masyarakat yang berada di wilayah border (Kecamatan Miangas dan Kecamatan Nanusa) yang diperbolehkan melewati Border Crossing Station Miangas dengan menggunakan Kartu Lintas Batas/ Border Crossing Card.

Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan

Penyebab kawasan perbatasan menjadi sesuatu yang menarik adalah adanya berbagai interaksi manusia dengan pola pergerakan di sisi dua negara yang berbeda. Meningkatnya pergerakan manusia di kawasan perbatasan menyebabkan implikasi di berbagai bidang, antara lain : Mengubah sifat/ nature dari hubungan internasional yang terbentuk, dengan adanya pergerakan manusia di kawasan perbatasan dapat mendorong pembangunan regional di antara negara yang lebih maju dan membentuk kesempatan kerjasama internasional (Akaha dan Vassilieva, 2005 dalam Kurniadi, 2009), sehingga perubahan paradigma pengembangan perbatasan

dari *inward looking* menjadi *outward looking* merupakan suatu persepsi yang penting untuk mengubah cara pandang kawasan perbatasan yang selama ini hanya dipandang sebagai *periphery* negara.

Kombinasi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang dilaksanakan serasi dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*) untuk tetap menjaga kedaulatan negara (*sovereignty*) merupakan strategi pengembangan potensi perbatasan. Melonguane sebagai kawasan perbatasan laut adalah salah satu kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang diharapkan dapat berperan sebagai outlet aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya, serta dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya maritime dalam rangka mendukung koridor ekonomi (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2011) sebagaimana visi BNPP yaitu : Terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2012).

PENUTUP

Kesimpulan

Perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud memperlihatkan *trend* yang semakin membaik, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak positif dari tahun 2007 sampai tahun 2011 masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor basis yang juga telah menimbulkan *multiplier effect* ke sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa, perdagangan dan bangunan yang juga terus meningkat dengan *trend* positif. Hasil analisis *shift share* menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, bahkan walaupun perekonomian lokal tidak bisa meningkatkan produktivitas namun pengaruh perekonomian Provinsi Sulawesi Utara dapat menyumbangkan komponen *share* sebagai komponen pertumbuhan wilayah.

Kota Melonguane menjadi salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan dengan strategi pengembangan yang diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas untuk meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi di Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan jarak yang lebih dekat ke Tibanban Filipina Selatan, menyebabkan aktivitas perekonomian di Miangas lebih banyak ke Tibanban. Hal ini dapat memperbaiki nilai kesejahteraan masyarakat jika ditunjang dengan akses lintas batas menjadi klasifikasi internasional.

Saran

1. Untuk pihak terkait
 - 1) Perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya alam dengan baik pada perbatasan Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 2) Melakukan review strategi pengembangan perbatasan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah, dapat dilakukan dengan meningkatkan *Capacity building* dan melaksanakan kemitraan (*partnership*);
 - 3) Pengalihan klasifikasi lintas batas dari tradisional menjadi internasional dipandang perlu, sehingga bukan hanya masyarakat atau pedagang di kawasan border saja yang dapat bertransaksi;
 - 4) Campur tangan pemerintah terhadap pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud dipandang perlu, karena terjadi *trend* yang negatif pada beberapa sektor di Talaud termasuk sektor basis;
 - 5) Sebagai kawasan PKSN Perlu optimisasi dan pengelolaan yang serius terhadap potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
2. Untuk kelanjutan studi
 - 1) Dapat dilakukan Kajian pengembangan ekonomi perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai perbatasan Indonesia-Filipina;
 - 2) Setelah klasifikasi lintas batas di Talaud menjadi internasional, dapat dilanjutkan studi dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian kawasan perbatasan dan pengembangan wilayah Kabupaten dan studi mengenai pengembangan wilayah dari perspektif lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ganggali. 2011. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan*, Materi Bupati 06 Mei 2011 Slide 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan talaud. Melonguane.
- Hadi, S. 2008. *Progam pembangunan kawasan perbatasan*, Hal: 2-3. Kawasan khusus dan daerah tertinggal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Husnadi. 2006. *Menuju model pengembangan kawasan perbatasan daratan antarnegara (Studi kasus : Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)*, Tesis Hal: 35. Universitas Diponegoro. Semarang
- Koespramoedyo, Mukti, Jaloeis, Nuaimi, Buamona, Djamaludin. 2003. *Strategi dan model pengembangan perbatasan Kalimantan*, Hal: 1-3. BAPPENAS. Jakarta
- Kurniadi, D. 2009. *Strategi pengembangan wilayah perbatasan antarnegara: Memacu pertumbuhan ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis Hal: 32. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan menteri dalam negeri Nomor 18 tahun 2007 Tentang Standardisasi sarana, prasarana dan pelayanan lintas batas antar Negara*. Kementrian Dalam Negeri. Jakarta
- Setiadi. 2009. *Konsep pusat-pinggiran : sebuah tinjauan teoritis*. Working paper on Regional Development Studies Nomor : KKI-01/KBP-PW/2009, Hal: 2-3. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Setiono. 2011. *Ekonomi Pengembangan Wilayah*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sukirno, S. 2010. *Mikroekonomi, Teori Pengantar Edisi Ketiga*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Suratman, E. 2004. *Dampak kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat : Analisis simulasi dengan pendekatan sistem neraca ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. V No. 01, 2004 Juli, Hal. 35-60.
- Tarigan. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta
- Tim Redaksi. 2012. *Media Perbatasan Edisi Khusus 2 tahun BNPP*, Hal : 44. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Jakarta
- Tim Penyusun (a). 2012. *Kepulauan Talaud Dalam Angka 2012* Hal : 3,67. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. Melonguane
- Tim Penyusun (b). 2012. *Produk Domestik Regional Bruto 2011 Kabupaten Kepulauan Talaud*. Badan Pusat Statistik. Melonguane.
- Tim Penyusun (c). 2012. *Sulawesi Utara Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik. Manado
- Tim Penyusun (d). 2011. *Rencana Induk Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Indonesia tahun 2011-2014* Hal: 24, 25, 30, 42. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Jakarta.
- Tim Penyusun (e). 2011. *Kajian pengembangan investasi wilayah perbatasan*, Hal : 13, 23. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jakarta.
- Tim Penyusun (f). 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Talaud*. BAPPEDA. Melonguane.
- Tim Penyusun (g). 2010. *Produk Domestik Regional Bruto 2009*. Badan Pusat Statistik. Melonguane
- Todaro M, Smith S. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi kesembilan*. Erlangga. Jakarta
- www.nscb.gov.ph. 2013. *Phillipine Standard Geographic Code Municipality Governor Generoso* Page : 1. *Phillipine Statistical Yearbook*. National Statistical Coordination Board Makati City, Philippines
- www.nscb.gov.ph. 2013. *List of municipalities Phillipine Statistical Yearbook* Page : 1. National Statistical Coordination Board Makati City, Philippines
- Zuasola, F. 2011. *Tilapia hatchery project launched* Page: 1-5. Davao Oriental Information Office. Mati. Downloaded at <http://news.davaooriental.com.ph/index.php/tilapia-hatchery-project-launched/>.